

Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Malang Tahun 2010-2019

Maria Sisilia, Harsono



Maria Sisilia, Harsono; Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Merdeka Malang, Jl. Terusan Raya Dieng 62-64, Malang, Jawa Timur.

ARTICLE INFO

Article history:

Received 2021-01-13

Received in revised form 2021-01-15

Accepted 2021-02-24

Kata kunci:

Pertumbuhan Ekonomi,
PAD, DAK, dan DAU.

Keywords:

Economic Growth, PAD,
DAK, DAU.

How to cite item:

Maria Sisilia, Harsono.
(2021). Analisis Pengaruh
Pendapatan Asli Daerah,
Dana Alokasi Khusus, dan
Dana Alokasi Umum
Terhadap Pertumbuhan
Ekonomi di Kota Malang
Tahun 2010-2019.
*Journal of Regional
Economics Indonesia*, 2(1).

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Malang tahun 2010-2019. Penelitian dilakukan di wilayah Kota Malang dengan menggunakan data sekunder tahun 2010-2019. Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi yaitu pengumpulan data sekunder dengan sumber-sumber tertulis berupa laporan keuangan yang ada di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang. Analisis data yang dilakukan menggunakan Analisis Deskriptif dan Analisis Regresi Linier Berganda. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD, DAK dan DAU berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Malang tahun 2010-2019.

Abstract

The purpose of this study is to determine the effect of local revenue, special allocation funds dan general allocation funds on economic growth in the city of Malang in 2010-2019. This research was conducted in the city of Malang using secondary data from 2010-2019. Data collection is done through documentation, namely secondary data collection through the collection of written sources in the form of financial reports that are in the Malang city regional revenue office. The data analysis used is descriptive analysis and multiple linear regression analysis. Based on the research results show that PAD, DAK dan DAU have a significant effect on economic growth in the city of Malang in 2010-2019.

* **Maria Sisilia, Harsono.**

© 2021 University of Merdeka Malang All rights reserved.

Peer review under responsibility of University of Merdeka Malang All rights reserved.

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara berkembang dengan taraf pembangunan ekonomi yang relatif masih rendah. Dalam hal ini, peranan pemerintah sangat dibutuhkan untuk melakukan intervensi kebijakan bagi peningkatan kualitas pembangunan. Berbagai kebijakan telah dilakukan, termasuk dalam ruang lingkup kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap penerimaan dan pengeluaran untuk mencapai tujuan seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas perekonomian dan pendistribusian pendapatan yang merata.

Pertumbuhan ekonomi merupakan permasalahan jangka panjang dalam pembangunan. Pertumbuhan ekonomi mengukur berapa besar kemampuan suatu negara dalam memproduksi barang dan jasa. Program-program pengeluaran dan pendapatan negara dapat mempermudah pencapaian tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi atau dapat menekan tingkat pertumbuhan tersebut. Peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat dilihat pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai tolak ukur untuk mengetahui kondisi perekonomian di suatu daerah.

Sebagai wilayah otonom, daerah mempunyai wewenang dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Pemberian otonomi daerah didasarkan atas pertimbangan bahwa daerah lebih mengetahui kebutuhan dan standar pelayanan bagi masyarakat di daerahnya.

Dalam memenuhi segala kebutuhan masyarakat, maka langkah yang dilakukan pemerintah adalah berusaha meningkatkan kemampuan keuangan sendiri, yakni dengan upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini dilakukan baik dengan meningkatkan penerimaan sumber PAD yang sudah ada maupun dengan penggalan sumber PAD yang baru sesuai dengan ketentuan serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sumber

pendapatan daerah terdiri atas hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Kemampuan daerah dalam menyediakan anggaran yang berasal dari daerah sangat bergantung pada kemampuan dalam mengelola potensi ekonomi yang ada menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu meningkatkan PAD yang digunakan untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Kurangnya kemampuan daerah dalam menyediakan dana untuk pembangunan daerah menyebabkan pemerintah daerah memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi kepada pemerintah pusat. Tingginya tingkat ketergantungan daerah memunculkan kebijakan desentralisasi fiskal, yaitu dengan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan pemberian dana yang diberikan kepada pemerintah daerah. Wujud pemberian dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam bentuk dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang dialokasikan kepada pemerintah daerah yang bertujuan untuk mengatasi kesenjangan keuangan daerah. Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang perlu diteliti adalah apakah DAU, DAK, dan PAD berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di kota Malang tahun 2010-2019.

2. Landasan Teori

A. Pertumbuhan Ekonomi dan PAD

Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah ekonomi dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi seringkali disama artikan dengan pembangunan ekonomi. Konsep pembangunan ekonomi mempunyai pengertian lebih luas dari konsep pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan usaha untuk mengubah suatu perekonomian yang kurang maju, sangat tradisional dan berpendapatan rendah menjadi suatu perekonomian yang modern yang mencapai taraf kemakmuran yang tinggi. Pembangunan ekonomi hanya akan tercapai apabila pendapatan per kapita masyarakat terus bertambah pada tingkat yang cukup cepat.

Sumber daya alam yang tersedia merupakan wadah yang paling mendasar dari kegiatan produksi suatu masyarakat. Jumlah sumber daya

alam yang tersedia merupakan batas maksimum bagi pertumbuhan suatu perekonomian. Jika sumber daya ini belum digunakan sepenuhnya, maka jumlah penduduk dan stok modal yang ada yang memegang peranan dalam pertumbuhan output. Tetapi pertumbuhan output tersebut akan berhenti jika semua sumber daya alam tersebut telah digunakan secara penuh. Dalam hal tersebut, pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu instrumen dalam keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah, sehingga semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi maka semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan masyarakat.

Salah satu indikator untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi adalah dengan melihat total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu daerah yang diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Menurut Sanusi (2003), PDRB merupakan dasar yang digunakan untuk mengukur atas nilai tambah yang timbul akibat adanya berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu daerah. Salah satu penentu kinerja PDRB adalah sumber pendapatan daerah yang diharapkan menjadi stimulus bagi perekonomian.

Salah satu penentu kinerja pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang diartikan sebagai akumulasi dari pos penerimaan pajak yang berisi pajak daerah dan pos retribusi daerah, pos penerimaan non pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, pos penerimaan investasi serta pengelolaan sumber daya alam. PAD menjadi salah satu indikator dalam menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi suatu daerah menunjukkan bahwa daerah tersebut mengalami kemajuan. Daerah dikatakan mengalami kemajuan ketika PAD tinggi, karena semakin tinggi tingkat pendapatan daerah maka tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat akan semakin berkurang.

Menurut Saragih (2003), peningkatan PAD sebenarnya merupakan akses dari pertumbuhan ekonomi daerah yang pertumbuhan ekonominya positif mempunyai kemungkinan mendapatkan kenaikan PAD. Dari perspektif ini seharusnya pemerintah daerah lebih berkonsentrasi pada pemberdayaan kekuatan ekonomi lokal untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi daripada sekedar mengeluarkan produk perundangan terkait dengan pajak atau retribusi. PAD yang berlebihan justru akan semakin

membebani masyarakat, menjadi disinsentif bagi daerah dan mengancam perekonomian secara makro (Mardiasmo, 2002).

Menurut Brata (2004), terdapat komponen penerimaan daerah yang berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional, yaitu PAD. Apabila peningkatan PAD dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, maka terdapat kemungkinan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, karena nilai DAU dan DAK pada umumnya lebih besar dibandingkan kontribusi PAD.

Peningkatan PAD akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Adanya kenaikan PAD akan memicu dan memacu pertumbuhan ekonomi daerah menjadi lebih baik daripada pertumbuhan ekonomi daerah sebelumnya. Kenaikan PAD juga dapat mengoptimalkan dan meningkatkan aktivitas pada sektor-sektor yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi, seperti sektor industri dan perdagangan, sektor jasa, dan sektor-sektor lainnya. Salah satu tujuan utama dari desentralisasi fiskal adalah terciptanya kemandirian daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan lokal, khususnya melalui PAD. Jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi.

B. Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK)

Menurut Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, DAU merupakan salah satu dana perimbangan yang menjadi bagian dari sumber pendapatan daerah. DAU adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk tujuan pemerataan kemampuan keuangan agar tidak terjadi penyimpangan antar daerah. Hal ini penting sehingga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Menurut Ardiansyah *et.al.* (2014), DAU disebut bantuan tak bersyarat (*unconditional grants*) karena jenis transfer antar tingkat pemerintah yang tidak terikat dengan program pengeluaran tertentu. Menurut Guntara (2014), DAU digunakan untuk mengatasi ketimpangan infrastruktur disetiap daerah agar terciptanya pertumbuhan ekonomi yang merata.

DAU dialokasikan kepada daerah propinsi dan kabupaten/kota. Tujuan dari pengalokasian DAU adalah untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah sehingga ketimpangan keuangan antar daerah akan semakin berkurang. DAU merupakan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersifat *block grant* dengan kewenangan dalam penggunaannya dilimpahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. DAU mempunyai peran yang sangat penting untuk menciptakan pemerataan dan keadilan antar daerah, dengan peranan yang strategis bisa memberikan makna otonomi yang lebih nyata.

Sementara untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu dalam membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (Halim, 2014). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, menjelaskan bahwa pelaksanaan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan atau perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan masyarakat dengan umur ekonomis yang panjang termasuk pengadaan sarana fisik penunjang dan tidak termasuk penyertaan modal.

Menurut Suparmoko (2002), DAK berasal dari APBN dan dialokasikan ke Kabupaten atau Kota untuk membiayai kebutuhan tertentu yang sifatnya khusus tergantung pada tersedianya dana dalam APBN. Kebutuhan khusus yang dimaksud adalah kebutuhan yang sulit diperkirakan dengan rumus Alokasi Umum dan kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional. DAK digunakan untuk menutup kesenjangan pelayanan publik antar daerah dengan memberi prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, lingkungan hidup, pertanian, kelautan dan perikanan, dan prasarana pemerintahan daerah. Menurut Siregar (2017), kegiatan yang didanai oleh DAK adalah kegiatan yang bersifat kegiatan fisik, maka daerah penerima DAK wajib menganggarkan dana pendamping sekurang-kurangnya 10% dari alokasi DAK yang diterima.

3. Metode Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel terikat, yaitu Pertumbuhan Ekonomi dan variabel bebas yang terdiri dari: (i) PAD (X_1), DAK (X_2), dan DAU (X_3). Definisi konseptual dan operasional masing-masing variabel tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi (Y), yaitu perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat (Sukirno, 2011). Dalam penelitian ini, variabel pertumbuhan ekonomi diukur dengan PDRB per tahun (%).
2. PAD (X_1), yaitu penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Mardiasmo, 2002).
3. DAK (X_2), yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu membiayai kegiatan ekonomi yang merupakan urusan daerah (Halim, 2014). Dalam penelitian ini, variabel DAK diukur dengan satuan milyar rupiah per tahun 2010-2019.
4. DAU (X_3), yaitu dana yang diberikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (UU Nomor 32 tahun 2004). Dalam penelitian ini, variabel DAU diukur dengan satuan milyar rupiah per tahun 2010-2019.

4. Hasil dan Pembahasan

A. Hasil Statistik Deskriptif

Deskripsi variabel dalam analisis statistik deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai mean dan standart deviasi, dengan variabel dependen yaitu Pertumbuhan Ekonomi dan variabel independen yaitu PAD, DAK dan DAU. Berikut adalah hasil analisis statistik deskriptif pada penelitian ini:

Tabel 01. Hasil Analisis Deskriptif Masing-Masing Variabel

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PERT.EKO	10	31377335.70	52341295.30	41220373.5700	7022783.86513
PAD	10	113502021.78	675931656.41	391330318.6820	183357718.34153
DAK	10	7476800.00	216458586.50	80877010.6680	83072201.24552
DAU	10	494910987.00	886503661.00	752345979.6310	136376539.20071
Valid N (listwise)	10				

Sumber: Hasil Analisis

Tabel *descriptive statistic* di atas menunjukkan bahwa:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel dependen (Y) menunjukkan bahwa nilai N atau jumlah data yang dianalisis sebanyak 10, dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 41220373.5700, nilai maksimum sebesar 52341295.30 pada tahun 2019, nilai minimum sebesar 31377335.70 pada tahun 2010 dengan standar deviasi (tingkat penyimpangan datanya) 7022783.86513.
2. PAD sebagai variabel independen (X_1) menunjukkan bahwa nilai N atau jumlah data yang dianalisis sebanyak 10, dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 391330318.6820, nilai maksimum sebesar 675931656.41 pada tahun 2019, nilai minimum sebesar 113502021.78 pada tahun 2010 dengan standar deviasi 183357718.34153.
3. DAK sebagai variabel independen (X_2) menunjukkan bahwa nilai N atau jumlah data yang dianalisis sebanyak 10, dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 80877010.6680, nilai maksimum sebesar 216458586.50 pada tahun 2019, nilai minimum sebesar 7476800.00 pada tahun 2010 dengan standar deviasi 83072201.24552.
4. DAU sebagai variabel independen (X_3) menunjukkan bahwa nilai N atau jumlah data yang dianalisis sebanyak 10, dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 752345979.6310, nilai maksimum sebesar 886503661.00 pada tahun 2019, nilai minimum sebesar 494910987.00 pada tahun 2010 dengan standar deviasi 136376539.20071.

B. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis linier berganda digunakan untuk melihat seberapa besar Pengaruh PAD, DAK dan DAU terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Malang. Analisis data ini menggunakan SPSS versi 20. Berikut hasil dari

analisis linier berganda:

Tabel 02. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Masing-Masing Koefisien Variabel Independen

Variabel	Koefisien Regresi	Sig.	Keterangan
(constant)	2359E7	.003	Signifikan
PAD	.023	.007	Signifikan
DAK	.018	.027	Signifikan
DAU	.010	.037	Signifikan
R	0.984		
R Square	0.969		
Adjusted R Square	0.954		
F	62.821		
Sig. F	0.000		
N	10		
a. Dependent Variabel : Pertumbuhan Ekonomi			

Sumber: Hasil Analisis

Berdasarkan Tabel 02, maka hasil analisis regresi linier berganda diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + \sum$$

$$Y = 2359E7 + 0.23X_1 + 0.18X_2 + 0.10X_3$$

Fungsi regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Konstanta (α) = 2359E7. Apabila PAD (X_1), DAK (X_2) dan DAU (X_3) = 0, maka pertumbuhan ekonomi sebesar 2359E7, artinya 2359E7 merupakan hasil dari variabel-variabel lain yang tidak dianalisis dimana variabel tersebut merupakan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi selain PAD, DAK dan DAU.
2. Koefisien regresi, PAD (X_1) = 0.23. Hal ini berarti bahwa kenaikan 1 milyar rupiah PAD akan menyebabkan kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 0.23 milyar rupiah, sebaliknya jika PAD menurun 1 milyar rupiah akan menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar 0.23 milyar rupiah.
3. Koefisien regresi, DAK (X_2) = 0.18. artinya apabila DAU naik 1 milyar maka menyebabkan pertumbuhan ekonomi naik sebesar 0.18 milyar rupiah. Sebaliknya, apabila DAK turun 1 milyar rupiah

maka menyebabkan pertumbuhan ekonomi menurun sebesar 0.18 milyar rupiah.

4. Koefisien regresi, $DAU (X_3) = 0.10$, artinya apabila DAU naik 1 milyar rupiah maka menyebabkan pertumbuhan ekonomi naik sebesar 0.10 milyar rupiah dan sebaliknya.

Hasil perhitungan regresi linier berganda memperoleh nilai koefisien korelasi berganda (R) sebesar 0.984 atau 98,4%. Ini menyatakan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen dapat dikategorikan kuat, sebab suatu hubungan dikatakan sempurna jika koefisien korelasinya mencapai angka 100%.

Hasil perhitungan regresi linier berganda menunjukkan nilai koefisien determinasi ($Adjusted\ R\ Square$) sebesar 0,954 atau 95,4%, yang artinya bahwa variabel independen dapat menjelaskan kepada variabel dependen sebesar 95.4%, sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh PAD, DAK dan DAU, sedangkan 4,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

C. Diskusi

Berdasarkan hasil analisis, dapat diketahui bahwa Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel dependen (Y) menunjukkan bahwa nilai N atau jumlah data yang dianalisis berjumlah 10, dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar Rp 41.220.373,57. Nilai maksimum sebesar Rp 52 341 295,30 yang terjadi pada tahun 2019 dan nilai minimum sebesar Rp 31 377 335,70 yang terjadi pada tahun 2010. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Malang pada tahun 2010 belum memaksimalkan pengelolaan sumber daya manusia melalui pendidikan yang tinggi karena semakin tinggi tingkat pendidikan manusia yang bekerja di Kota Malang maka semakin tinggi pula tingkat pertumbuhannya.

PAD sebagai variabel independen (X_1) menunjukkan bahwa nilai N atau jumlah data yang dianalisis sebanyak 10 dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar Rp 332.510.366, nilai maksimum sebesar Rp675.931.656,41 pada tahun 2019 dan nilai minimum sebesar Rp113.502.021,78 pada tahun 2010. Hal ini mengindikasikan bahwa pemungutan pajak dan retribusi daerah masih belum dilakukan secara optimal serta sumber daya untuk menggali sumber-sumber penerimaan daerah belum tersedia dengan baik.

DAK sebagai variabel independen (X_2) menunjukkan bahwa nilai N

sebanyak 10 dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar Rp62.431.764,60, nilai maksimum sebesar Rp185.881.892.00 pada tahun 2019 dan nilai minimum sebesar Rp7.476.800,00 pada tahun 2010. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Malang belum memaksimalkan PAD sehingga pemerintah daerah masih sangat bergantung kepada pemerintah pusat dengan nilai DAK yang semakin tinggi di tahun 2019. Pada tahun 2010 Kota Malang mengalami penurunan DAK dikarenakan pada tahun 2010 belum ada program pembangunan infrastruktur sehingga DAK dialokasikan untuk tiga pos yaitu kesehatan, kelautan dan program sanitasi.

DAU sebagai variabel independen (X_3) menunjukkan bahwa nilai N atau jumlah data yang dianalisis sebanyak 10 dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar Rp752.345.979,6, nilai maksimum sebesar Rp886.503.661.00 pada tahun 2019 dan nilai minimum sebesar Rp494.910.987,00 pada tahun 2010. DAU diberikan kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk mengatasi ketimpangan keuangan antar daerah. Ketika DAU mengalami penurunan hal ini berarti daerah Kota Malang mengalami peningkatan PAD sehingga ketimpangan keuangan daerah Kota Malang dengan daerah lainnya bisa diatasi dengan dana yang bersumber dari PAD. Ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Malang sudah mengoptimalkan pemungutan pajak dan retribusi serta penggalian potensi-potensi di Kota Malang sudah dilakukan secara optimal.

Berdasarkan hasil analisis pada penelitian ini menunjukkan bahwa variabel PAD (X_1) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Malang tahun 2010-2019 dengan memperoleh hasil nilai sig. Sebesar 0.007, uji t sebesar 15.111 dan hasil koefisien regresi sebesar 0.023. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi jumlah PAD maka tingkat pertumbuhan ekonomi akan semakin meningkat. PAD merupakan salah satu sumber penerimaan yang terus menerus dipacu pertumbuhannya. Seperti pendapat Baldric (2017) yang menyatakan bahwa sektor PAD memegang peran yang sangat penting karena melalui sektor ini dapat diketahui sejauh mana suatu daerah membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. Penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Prantini (2014) yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, variabel DAK (X_2) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Malang tahun 2010-2019 dengan memperoleh nilai sig. sebesar 0.027 dan uji t sebesar 11,208 dengan hasil koefisien regresi sebesar 0.018. Menurut Suparmoko (2002), DAK berasal dari APBN dan dialokasikan ke Kabupaten atau Kota untuk membiayai kebutuhan tertentu yang sifatnya khusus tergantung pada tersedianya dana dalam APBN. Kebutuhan khusus yang dimaksud adalah kebutuhan yang sulit diperkirakan dengan rumus Alokasi Umum dan kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional.

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan variabel DAU berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Malang tahun 2010-2019. Dengan memperoleh nilai sig. sebesar 0.037 dan uji t sebesar 7.969 dengan hasil koefisien regresi sebesar 0.010. Menurut Guntara (2014) DAU digunakan untuk mengatasi ketimpangan infrastruktur di setiap daerah agar terciptanya pertumbuhan ekonomi yang merata.

5. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Rata-rata persentase pertumbuhan ekonomi di Kota Malang tahun 2010-2019 sebesar 5.85%, rata-rata persentase perkembangan PAD tahun 2010-2019 sebesar 23.31%, rata-rata persentase perkembangan DAK di Kota Malang tahun 2010-2019 sebesar 31.129%, dan rata-rata persentase perkembangan DAU di Kota Malang tahun 2010-2019 sebesar -6.16%.
2. Uji F pada penelitian ini dengan α sebesar 0.05% menunjukkan bahwa variabel PAD (X_1), variabel DAK (X_2) dan variabel DAU (X_3) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Malang tahun 2010-2019. Hal tersebut dibuktikan melalui hasil analisis uji statistik dengan nilai sig. $0.000 < 0.05$ artinya H_a diterima dan H_0 ditolak.
3. Variabel PAD (X_1), lebih dominan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi (Y), dibandingkan dengan variabel DAK (X_2) dan DAU (X_3). Hal ini dapat dilihat pada nilai signifikan masing-masing

variabel yaitu nilai signifikan variabel PAD lebih rendah dari nilai signifikan variabel DAK dan DAU.

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan, maka diusulkan saran-sara untuk membantu dalam pengambilan kebijakan dalam mengalokasikan Pendapatan Daerah, yang secara spesifik adalah sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka pemerintah daerah diharapkan bisa terus menggali potensi-potensi yang ada guna menambah PAD, demikian juga pemerintah daerah mengupayakan agar bisa menarik DAK dan DAU semaksimal mungkin.
2. Diharapkan kepada Pemerintah Kota Malang untuk mengoptimalkan penggalan potensi-potensi yang ada di daerah Kota Malang guna menambah PAD. Hal ini juga dapat diberlakukan kepada pemerintah daerah yang lain.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambah variabel lain yang lebih bervariasi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan dalam pemilihan data menggunakan rentang periode yang lebih lama dengan data terbaru.

Daftar Pustaka

- Anwar. Meilita, Sutomo Palar & Jaeline Sumual. 2016. *Pengaruh DAU, DAK, PAD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Manado Tahun 2001-2013*. Universitas Sam Ratulangi: Manado
- Ardiansyah & Vitalis. 2014. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kota di Perovinsi Jawa Tengah*. Simposium nasional akuntansi XVII. Mataram.
- Baldric. 2017. *Akuntansi Pemerintahan Dengan Sistem Dana*. Sekolah Tinggi Ekonomi YKPN: Yogyakarta.
- Bastian. pengaruh PAD,DAU dan DAK Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Dan Provinsi Sumatra Utara.2013. Univesrsitas Potensi Utama
- Boediono. 1985. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Penerbit BPFE.Yogyakarta
- Brata, Aloysius Gunadi. 2004. *Komposisi Penerimaan Sektor Publik dan Pertumbuhan Ekonomi Regional*. Lembaga Penelitian Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

- Darise. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: PT. Indeks
- Fikri.khusnul, Usep Sudrajat dan Yudha Remofa. 2019. Pengaruh PAD, DAU dan DAK Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Indragiri Hulu. 2019. *Jurnal Manajemen dan Bisnis* Vol. 8, No.2. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indragiri (STIE-I) Rengat.
- Ghozali Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Edisi ke empat. Badan penerbit UNDIP. Semarang.
- Halim.Abdul. 2001. *Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit UPP AMP YKPN: Yogyakarta.
- Harianto, David & Priyo Hari Adi. 2007. *Hubungan antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Per Kapita*. Simposium Nasional Akuntansi X, Unhas Makasar 26-28 Juli 2007.
- Kusumawati. Lily dan I Gusti Wiksuana. 2018. Pengaruh Pendapatan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di wilayah Sarbagita Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen Unud*, Vol.7, No.5. Universitas Udayana: Bali.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Saragih. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Saraswati. Ida, I Wayan Ramantha. 2018. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengn Belanja Modal dan Investasi Swasta sebagai Pemoderasi*. Vol. 24, <https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v24.i01.p25>. Universitas Udayana.Bali.
- Siregar.2017. *Akuntansi Pemerintahan Dengan Sistem Dana*. Sekolah Tinggi Ekonomi YKPN: Yogyakarta.
- Siswiyanti. 2015. Pengaruh PAD, DAU, DAK Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening. *AKRUAL*. Vol. 7, No. 2.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis*. Penerbit Alfabeta: Bandung.
- Sukirno. Sadono. 2004. *Pengantar Teori Makroekonomi*. Edisi ketiga. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Suparmoko. 2002. *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. ANDI: Yogyakarta.